

Koordinasi Antar Instansi dalam Meningkatkan Waktu Tanggap Operasi Pencarian dan Pertolongan Saat Bencana pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Iwan Rosyadi*

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

iwanbsn@yahoo.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Article history :

Received : Maret 21, 2025

Revised : Mei 24, 2025

Accepted : Juni 15, 2025

Keywords :

Koordinasi Antar Instansi;
Waktu Tanggap (Response Time);
Operasi Pencarian dan
Pertolongan (SAR);
Bencana (Disaster);
Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan (Basarnas);



Copyright (c) 2026

Jurnal Reformasi Administrasi:
Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan
Masyarakat Madani

ABSTRACT

Berdasarkan observasi awal koordinasi antar instansi dalam berbagi informasi, khususnya mengenai data bencana, distribusi bantuan, dan kondisi di lapangan, kadang tidak optimal. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam distribusi bantuan dan respons yang tidak tepat sasaran, serta informasi yang tidak selalu akurat. Selain itu, setiap instansi sering kali memiliki SOP yang berbeda, dan ini memperlambat proses pengambilan keputusan ketika bencana terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi bagaimana Koordinasi Antar Instansi dalam Meningkatkan Waktu Tanggap Operasi Pencarian dan Pertolongan Saat Bencana Pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi dengan jumlah informan sebanyak 6 (Enam) orang. Hasil penelitian menunjukkan Koordinasi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dalam meningkatkan waktu tanggap saat bencana masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan koordinasi antar instansi di Basarnas melibatkan penyusunan SOP bersama, penggunaan sistem komunikasi canggih, dan pemantauan real-time. Langkah ini memastikan peran setiap tim jelas dan koordinasi berjalan lancar, mempercepat waktu tanggap saat bencana dan meningkatkan efisiensi operasi Pencarian dan Pertolongan di lapangan. Kendala utama yang ditemukan dalam koordinasi adalah perbedaan prosedur antar instansi, masalah komunikasi akibat gangguan akses, dan keterbatasan sumber daya. Kendala ini sering memperlambat respons awal dan mempengaruhi efisiensi distribusi bantuan serta pengorganisasian tim SAR di lapangan, yang berdampak pada waktu tanggap. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam koordinasi antar instansi untuk meningkatkan waktu tanggap saat bencana yaitu penguatan infrastruktur komunikasi, dan peningkatan keterampilan melalui latihan gabungan. Selain itu, pemantauan real-time dan peningkatan jumlah personel juga memastikan distribusi sumber daya tepat sasaran dan respons lebih cepat saat bencana terjadi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki lebih dari 15.000 pulau dan sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah laut. Indonesia juga merupakan negara yang rawan bencana. Ketersediaan layanan SAR di seluruh Wilayah Indonesia merupakan suatu keharusan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan setiap orang yang melakukan aktifitas di Indonesia.

Pemerintah memberikan tugas dan tanggung jawab untuk penyelenggaraan SAR di Indonesia kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) yang tertuang dalam Undang-undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam pasal 16. Saat ini Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) memiliki 43 Kantor SAR yang tersebar di semua Propinsi di Indonesia, yang dalam pelaksanaan operasi SAR dikontrol oleh Deputy Bidang Operasi SAR melalui *Basarnas Command Center* (BCC) yang berada di lantai 11 Kantor Pusat Basarnas di Jakarta.

Setiap Kantor SAR memiliki wilayah tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan nomor 5 Tahun 2021 tentang Wilayah Pencarian dan Pertolongan Indonesia. Pembagian wilayah tanggung jawab ini akan memudahkan Kantor SAR menentukan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan operasi SAR, jumlah personel, menentukan

penempatan sarana dan personel, serta menghitung Response Time (*readiness time + deployment time* atau waktu persiapan + waktu tempuh ke lokasi kejadian).

Ruang lingkup penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Basarnas tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, bahwa Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan dilakukan terhadap:

1. Kecelakaan kapal dan pesawat udara;
2. Kecelakaan dengan penanganan khusus;
3. Bencana pada tahap tanggap darurat; dan/atau
4. Kondisi Membahayakan Manusia.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, setiap Kantor SAR dilengkapi dengan prasarana dan sarana seperti Kantor, Gedung Siaga, *Mess Rescuer*, *Kapal SAR*, *Rigid Inflatable Boat*, *Perahu Karet*, *Rescue Car*, *Rescue truck*, serta peralatan pendukung Pencarian dan Pertolongan seperti peralatan evakuasi vertical untuk tebing dan Gedung, peralatan selam, peralatan deteksi bawah air, peralatan deteksi korban di reruntuhan gedung, Gas Detector, alat komunikasi, peralatan medis dasar serta peralatan SAR lainnya.

Masing-masing Kantor SAR memiliki personel antara 30 orang sampai 150 orang termasuk petugas administrasi. Jumlah personel yang dapat secara langsung terlibat dalam suatu operasi, baik untuk melaksanakan siaga di Kantor SAR maupun melaksanakan operasi SAR secara langsung di lokasi kejadian, berjumlah antara 20 orang sampai 90 orang per Kantor SAR.

Dalam suatu kejadian kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, bencana maupun kondisi membahayakan manusia yang memerlukan bantuan SAR, kecepatan tiba di lokasi kejadian sangat berpengaruh terhadap kemungkinan selamat korban. Semakin cepat tim SAR tiba di lokasi kejadian, kemungkinan korban dapat dievakuasi dalam keadaan hidup semakin besar. Hal ini berkaitan dengan teori "*Rule of Three in Survival*" yang terdapat dalam beberapa buku panduan survival, seperti buku "*SAS Survival Handbook*" edisi ke-3 tahun 2015 oleh John "Lofty" Wiseman sebagai berikut:

Ketika berada dalam keadaan survival yang sesungguhnya, sebaiknya mengingat prioritas pada empat level bertahan hidup dari *the Survival Rules of 3*:

1. Seseorang dapat bertahan hidup selama 3 menit tanpa udara (Oksigen) begitu juga ketika seseorang terendam di air es.
2. Seseorang dapat bertahan hidup selama 3 jam tanpa shelter pada cuaca ekstrim, sangat dingin atau sangat panas.
3. Seseorang dapat bertahan hidup selama 3 hari tanpa air (terlindung dari cuaca ekstrim tetapi tanpa air minum).
4. Seseorang dapat bertahan hidup selama 3 minggu tanpa makanan (meskipun ada air minum dan shelter/ terlindung dari cuaca ekstrim).

Waktu tanggap dalam keadaan darurat menurut Sutawijaya (2009), memiliki filosofi: "*Time Saving it's Live Saving*", artinya dalam menangani keadaan darurat, seluruh tindakan yang dilakukan harus benar-benar efektif dan efisien, mengingat kecepatan bertindak untuk menolong, seiring dengan kemungkinan korban selamat. Sutawijaya (2009) dalam Maatilu (2014) mengatakan bahwa dalam kondisi gawat darurat pasien dapat kehilangan nyawa dalam hitungan menit. Nafas berhenti dalam waktu 2-3 menit sehingga dapat menyebabkan kematian yang fatal.

Berdasar hal tersebut, teori *Rule of Three* dan filosofi waktu tanggap menurut Sutawijaya (2009), kemampuan bertahan hidup orang yang mengalami keadaan darurat karena kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat udara, bencana maupun kondisi membahayakan manusia, memiliki batasan waktu. Semakin cepat terbebas/ terselamatkan dari kondisi darurat tersebut, semakin besar kemungkinan untuk selamat, atau sebaliknya, semakin lama tidak mendapat pertolongan, semakin kecil harapan bertahan

hidup. Sehingga kecepatan Tim SAR untuk tiba di lokasi kejadian berpengaruh besar terhadap kemungkinan besar korban terselamatkan.

Mengingat hal tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, sebagai Lembaga pemerintah yang diberikan mandat untuk menyelenggarakan Operasi Pencarian dan Pertolongan, menetapkan Waktu Tanggap (*Response Time*) sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama di dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 ini. Standar response time merupakan indikator yang baik dalam operasi Pencarian dan Pertolongan. Dengan response time ini mengetahui tingkat performa petugas penyelamat. Dapat juga digunakan para pengambil keputusan untuk mengetahui objektifitas pelayanan, sekaligus dapat digunakan untuk menentukan jenis-jenis sumber daya yang sesuai untuk mendukung response time. Mengukur kepuasan terhadap response time petugas SAR dapat dilakukan dengan meminta pendapat masyarakat.

Menurut Ulander (2015), response time dihitung sejak alarm diterima oleh tim penyelamat, sampai tim penyelamat dapat mulai bekerja di lokasi kejadian. Sedang response time mencakup waktu persiapan, waktu perjalanan, dan waktu intervensi. Waktu persiapan dimulai dari alarm diterima oleh tim penyelamat, sampai dengan tim penyelamat bersiap menuju lokasi kejadian. Waktu perjalanan dihitung sejak waktu kendaraan tim penyelamat bergerak keluar kantor yang menerima berita, menuju lokasi kejadian. Waktu intervensi dihitung sejak tim penyelamat tiba di lokasi, sampai dengan kegiatan penyelamatan pertama dimulai. Waktu tanggap secara langsung terkait dengan posisi kantor, kecepatan, dan waktu persiapan petugas penolong (Ulander, 2015)

Informasi response time sangat berguna untuk mengidentifikasi keberhasilan pada setiap operasi pencarian dan pertolongan, dan bermanfaat sebagai evaluasi untuk membuat aturan atau petunjuk teknis dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Response time yang ditentukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) terdiri dari waktu respons dan waktu tempuh. Waktu respons ditargetkan dalam Rencana Strategis Basarnas yang setiap tahun berubah dan lebih cepat, untuk tahun 2021 ditargetkan 27 menit, tahun 2022 26,5 menit dan tahun 2023 adalah 26 menit sejak berita diterima, sampai unit pencarian dan pertolongan meninggalkan kantor untuk menuju lokasi. Sedangkan waktu tempuh ditetapkan untuk seluruh wilayah Indonesia, di manapun, maksimal adalah 150 menit sejak unit Pencarian dan Pertolongan meninggalkan kantor sampai tiba di lokasi.

Data pemenuhan target Waktu Tanggap Basarnas tahun 2020 sampai 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Waktu Tanggap (Response Time) Basarnas Tahun 2020 s/d 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022		
	Target Menit	Realisasi	%	Target Menit	Realisasi	%	Target Menit	Realisasi	%
kecelakaan pesawat udara	27,2	8,75	167,83	27	11,25	158,33	26	12,00	
kecelakaan kapal	27,2	17,9	134,19	27	19,72	126,96	26	33,02	
Bencana	27,2	15,33	143,64	27	17,66	134,59	26	16,69	
Kondisi Membahayakan Manusia	27,2	18,6	131,62	27	17,23	136,19	26	18,84	
Kecelakaan dg Penanganan Khusus	27,2	10,59	161,07	27	13,07	151,59	26	14,57	

Sumber: Basarnas Command Center

Data di atas memperlihatkan hasil penilaian Indikator Kinerja Utama untuk *Response Time* atau Waktu Tanggap yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Basarnas tahun 2020-2024 tersebut telah tercapai, bahkan lebih, hingga 167% pada Response Time Kecelakaan Pesawat Udara di tahun 2020. Akan tetapi indikator yang dipakai pada data di atas (sama dengan indikator yang digunakan di Rencana Strategis Basarnas tahun 2020-2024) masih sebatas Waktu Tanggap pada *preparadness time* (waktu persiapan) atau waktu dihitung mulai informasi kajadian/ permintaan bantuan SAR diterima, pengecekan kebenaran kejadian, pengumpulan data dan informasi tentang kejadian, persiapan peralatan sampai Tim SAR meninggalkan kantor.

Sementara definisi secara umum *Response Time* adalah sejak informasi kejadian maupun permintaan bantuan SAR diterima, pengecekan kebenaran kejadian, pengumpulan data dan informasi

tentang kejadian, persiapan peralatan, Tim SAR meninggalkan kantor, waktu perjalanan, hingga Tim SAR tiba di lokasi kejadian. Sehingga masih belum menggambarkan indikator *Response Time* yang berlaku umum. Selain itu, dari data di atas, terlihat kecenderungan Waktu Tanggap semakin melambat atau prosentasi capaian semakin menurun meskipun masih di atas target.

Untuk memenuhi target Waktu Tanggap yang ditentukan, Basarnas melaksanakan Siaga SAR 24 jam setiap hari, 7 hari perminggu, sepanjang tahun. Siaga SAR untuk Rescue Coordinator Center dilaksanakan di Basarnas *Command Center* di lantai 11 Gedung Basarnas Jl. Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat dan untuk *Rescue Sub-Center* (RSC) atau Kantor SAR serta di Pos SAR maupun Unit Siaga SAR yang merupakan bagian dari Kantor SAR, dilaksanakan di ruang komunikasi masing-masing.

Siaga SAR di Basarnas Command Center (BCC) diawaki sembilan orang setiap shift, dilaksanakan 2 shift per 24 jam, dan tujuh orang di Ruang Komunikasi Kantor SAR, serta sedikitnya 2 orang di Pos SAR dan Unit Siaga SAR. Hal ini tidak sesuai dengan standar siaga yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan nomor 9 tahun 2021 tentang Siaga yang diantaranya menetapkan jumlah petugas siaga SAR di Basarnas Command Center berjumlah 12 orang pershift dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2. Petugas Siaga SAR di Basarnas Command Center

No	Jabatan	Jumlah per orang
1	Kepala Siaga Harian	1
2	Asisten Kepala Siaga Harian	2
3	Operator Komunikasi	1
4	Operator LUT	1
5	Siaga Aplikasi, IMSAR, Ship Tracking	1
6	Siaga Rescuer	6

Sumber: Basarnas Command Center (2023)

Dalam peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa Siaga SAR dilaksanakan 3 shift dalam 24 jam, sementara karena keterbatasan personel, siaga SAR dilaksanakan hanya 2 shift per 24 jam. Tentu hal ini menimbulkan permasalahan lain berupa kelebihan jam kerja sebanyak 4 jam tiap orang pershift. Mengingat *rule of three* di atas, informasi kejadian yang memerlukan bantuan SAR memegang peran penting dalam penyelamatan korban. Informasi yang cepat diterima oleh petugas siaga SAR, verifikasi kebenaran informasi/ berita, analisa jenis kejadian, lokasi kejadian, waktu kejadian, kondisi jalanan, cuaca dalam perjalanan dan di sekitar lokasi kejadian, pemilihan asset dan peralatan SAR yang tepat, akan mempersingkat Response Time dan memperbesar harapan korban dievakuasi dalam keadaan selamat.

Ketersediaan alat bantu siaga di Basarnas *Command Center* yang telah banyak menggunakan teknologi saat ini dan teknologi informasi, akan sangat memudahkan petugas siaga SAR menerima informasi, menverifikasi kebenaran berita/ informasi, mengolah informasi dan mendistribusikan hasilnya. Tentu diperlukan kompetensi petugas siaga SAR yang memadai untuk mengawaki Basarnas Command Center maupun Ruang Komunikasi di Kantor SAR. Standard kompetensi petugas siaga SAR telah diatur dalam peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan nomor 8 tahun 2021 tentang Siaga.

Selain hal tersebut, Response Time juga terpengaruh oleh koordinasi, baik koordinasi internal antar petugas siaga SAR, antara petugas siaga SAR dengan atasan sebagai penanggung jawab siaga dan operasi SAR, antara petugas siaga Basarnas Command Center dengan petugas siaga Kantor SAR, juga koordinasi petugas siaga dengan pihak luar seperti pengatur lalu lintas udara (*Air Traffic Controller*), Stasiun Radio Pantai (SROP), Nahkoda kapal di sekitar lokasi kejadian, instansi terkait seperti BMKG, BNPB, Polisi, Angkatan Laut, perusahaan pemilik kapal/ pesawat yang mengalami kecelakaan, maupun RCC negara lain yang terkait kejadian.

Berdasarkan fenomena masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai koordinasi antar bagian dalam meningkatkan waktu tanggap operasi SAR saat

bencana. Beberapa fenomena masalah yang sering terjadi dalam koordinasi antar instansi saat penanggulangan bencana diantaranya ketidaksepahaman dan tumpang tindih peran yaitu kebingungan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Akibatnya, beberapa aspek penanganan bisa saling tumpang tindih atau malah terabaikan.

Koordinasi antar instansi dalam berbagi informasi, khususnya mengenai data bencana, distribusi bantuan, dan kondisi di lapangan, kadang tidak optimal. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam distribusi bantuan dan respons yang tidak tepat sasaran, serta informasi yang tidak selalu akurat. Selain itu, setiap instansi sering kali memiliki SOP yang berbeda, dan ini memperlambat proses pengambilan keputusan ketika bencana terjadi. Misalnya, standar untuk evakuasi atau penyelamatan bisa berbeda antara BNPB dan TNI serta Kementerian/ Lembaga maupun organisasi lain, sehingga menimbulkan kebingungan di lapangan.

Masalah sumber daya juga kerap kali menjadi masalah. Tidak semua instansi memiliki sumber daya yang cukup, baik dari segi personel, peralatan, maupun anggaran. Koordinasi untuk mengatasi keterbatasan ini sering kali berjalan lambat, sehingga mengurangi efektivitas penanganan bencana. Misalnya, keterlambatan pengiriman logistik ke daerah bencana karena birokrasi antar instansi atau akses yang sulit.

Pelatihan dan simulasi evakuasi atau penyelamatan bencana secara terpadu antar instansi masih minim, sehingga saat bencana terjadi, personel dari berbagai instansi kurang siap bekerja secara harmonis. Kegiatan ini diperlukan agar semua instansi dapat memahami alur kerja yang jelas dan tanggap terhadap peran mereka masing-masing. Pengambilan keputusan terkait bantuan dan penanganan bencana sering terhambat oleh birokrasi atau kepentingan politik lokal. Ini dapat menghambat kolaborasi antar instansi dan mempersulit proses penyaluran bantuan, terutama jika terdapat konflik kepentingan atau masalah kewenangan di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling disebut dengan Penentuan Informan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 (Enam). Informan adalah orang yang dipandang memiliki pengetahuan atau informasi mengenai suatu hal atau peristiwa tertentu. Kualifikasi tersebut dimiliki oleh yang bersangkutan, baik karena kedudukannya sebagai orang yang berwenang pada jabatan tertentu, maupun karena kegiatannya dalam proses di bidang tertentu, maupun karena kegiatannya dalam proses bidang tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, selanjutnya penulis menyajikan pembahasan yang lebih mendalam dari hasil penelitian tersebut.

1. Koordinasi Antar Instansi dalam Meningkatkan Waktu Tanggap Operasi Pencarian dan Pertolongan Saat Bencana Pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Penelitian mengenai pelaksanaan Koordinasi Antar Instansi dalam Meningkatkan Waktu Tanggap Operasi Pencarian dan Pertolongan Saat Bencana Pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menggunakan teori dari (Mintzberg, 2023) yang terdiri dari 5 (lima) dimensi. Dalam meningkatkan waktu tanggap operasi SAR (*Search and Rescue*) saat bencana, Koordinasi Antar Instansi dalam Meningkatkan Waktu Tanggap Operasi Pencarian dan Pertolongan Saat Bencana Pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sangat bergantung pada dimensi penyesuaian bersama. Penyesuaian bersama ini dapat dianalisis melalui beberapa aspek yang tercermin dalam wawancara yang dilakukan, seperti penyusunan SOP bersama, komunikasi yang efektif, dan pengelolaan sumber daya yang fleksibel.

Pengawasan langsung diterapkan melalui komando lapangan yang mengawasi setiap langkah tim SAR di lokasi. Komandan lapangan bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan SOP, mengevaluasi perkembangan di lapangan, dan memastikan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dari prosedur yang telah disepakati. Pengawasan yang ketat ini juga membantu mengidentifikasi

masalah atau hambatan yang mungkin terjadi selama operasi, dan memberikan arahan cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dimensi standarisasi proses dalam koordinasi sangat penting dalam meningkatkan waktu tanggap operasi Pencarian dan Pertolongan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Hal ini terkait dengan upaya Basarnas dalam memastikan bahwa seluruh bagian dan instansi terkait bekerja dengan cara yang seragam dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam wawancara yang dilakukan, beberapa upaya standarisasi yang telah dilakukan oleh Basarnas terbukti efektif dalam mempercepat respons di lapangan.

Dimensi standarisasi output dalam koordinasi operasional sangat penting dalam meningkatkan waktu tanggap operasi Pencarian dan Pertolongan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Standarisasi output mengacu pada hasil yang diharapkan dari setiap bagian dalam operasi Pencarian dan Pertolongan yang harus terukur dan terkoordinasi dengan baik antar bagian terkait. Tujuan dari standarisasi output ini adalah memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap bagian sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan bersama, sehingga tidak ada upaya yang terbuang sia-sia dan waktu tanggap dapat dipercepat.

Dimensi standarisasi keterampilan dalam koordinasi antar instansi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) sangat penting untuk memastikan peningkatan waktu tanggap dalam operasi Pencarian dan Pertolongan saat bencana. Standarisasi keterampilan memastikan bahwa setiap anggota tim, baik dari Basarnas maupun instansi terkait lainnya seperti BPBD, TNI, dan Polri, memiliki tingkat kompetensi yang sama dalam menjalankan tugasnya. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses operasional, mengurangi kesalahan yang bisa terjadi, dan menciptakan efisiensi dalam respons terhadap bencana.

2. Kendala yang dihadapi dalam Koordinasi Antar Instansi dalam Meningkatkan Waktu Tanggap Operasi Pencarian dan Pertolongan Saat Bencana Pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Koordinasi antar instansi dalam operasi Pencarian dan Pertolongan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) merupakan aspek kunci dalam mempercepat waktu tanggap saat bencana. Namun, dalam proses koordinasi ini terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi kecepatan dan efektivitas respons terhadap bencana. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, beberapa kendala utama yang ditemukan dalam koordinasi antar instansi yang berkontribusi terhadap waktu tanggap operasi Pencarian dan Pertolongan adalah perbedaan prosedur dan prioritas antar instansi, masalah komunikasi, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing bagian. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam koordinasi adalah adanya perbedaan prosedur operasional dan prioritas antara berbagai instansi yang terlibat, seperti Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri. Setiap instansi memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang berbeda, yang meskipun pada dasarnya mengarah pada tujuan yang sama, yaitu penanggulangan bencana, seringkali membutuhkan waktu lebih lama untuk diselaraskan. Perbedaan ini bisa memperlambat respons awal di lapangan.

Kendala kedua yang ditemukan dalam koordinasi adalah masalah komunikasi yang sering terjadi, terutama saat akses ke lokasi bencana terputus atau saluran komunikasi terganggu. Masalah komunikasi ini sangat berbahaya dalam operasi Pencarian dan Pertolongan karena dapat memperlambat pengambilan keputusan dan koordinasi antara tim di lapangan dan pusat kendali.

. Keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk personel maupun perlengkapan, menjadi kendala signifikan dalam operasi SAR. Di banyak kasus, jumlah personel yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan, terutama saat bencana berskala besar. Selain itu, masalah distribusi peralatan dan logistik yang tidak merata di beberapa titik juga menghambat kelancaran operasi.

Salah satu masalah lain yang dihadapi dalam koordinasi adalah kurangnya pemahaman yang sama tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian. Meskipun SOP bersama telah disusun, dalam praktiknya masih ada bagian-bagian yang memiliki interpretasi berbeda terhadap

prosedur yang sudah ada. Hal ini sering terjadi ketika operasi Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan di bawah tekanan tinggi dan dalam kondisi darurat.

3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada saat Koordinasi Antar Instansi dalam Meningkatkan Waktu Tanggap Operasi Pencarian dan Pertolongan Saat Bencana Pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Koordinasi Antar Instansi dalam Meningkatkan Waktu Tanggap Operasi Pencarian dan Pertolongan Saat Bencana Pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menjadi aspek krusial dalam menghadapi bencana besar yang memerlukan respons cepat dan efektif. Meskipun terdapat sejumlah kendala dalam koordinasi, Basarnas telah mengimplementasikan berbagai upaya strategis untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan meningkatkan efektivitas waktu tanggap operasi SAR.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, beberapa kendala utama yang dihadapi Basarnas adalah perbedaan prosedur antara instansi, masalah komunikasi, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing bagian. Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, Basarnas telah melaksanakan berbagai upaya yang mencakup penyusunan SOP bersama, penguatan infrastruktur komunikasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya logistik.

Salah satu kendala utama yang ditemukan dalam koordinasi adalah perbedaan prosedur dan prioritas antar instansi. Setiap instansi yang terlibat dalam operasi SAR, seperti Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri, memiliki prosedur operasional yang berbeda. Hal ini seringkali menyebabkan waktu tanggap menjadi lebih lama karena perlunya penyesuaian antara berbagai pihak yang terlibat. Untuk mengatasi masalah ini, Basarnas bersama instansi terkait menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) bersama yang berlaku selama operasi penanggulangan bencana. SOP ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan tindakan dan prosedur kerja antar instansi, memastikan bahwa setiap pihak tahu perannya dengan jelas dalam situasi apapun. Dengan penyusunan SOP bersama, Basarnas memastikan bahwa seluruh tim yang terlibat dalam operasi memiliki pemahaman yang seragam tentang apa yang perlu dilakukan, kapan, dan bagaimana cara melakukannya.

Masalah komunikasi menjadi kendala signifikan dalam operasi SAR, terutama saat akses ke lokasi bencana terputus atau saluran komunikasi terganggu. Tanpa komunikasi yang efektif, koordinasi antar instansi tidak dapat berjalan dengan baik, yang pada akhirnya akan memperlambat waktu tanggap. Untuk mengatasi kendala ini, Basarnas mengidentifikasi kebutuhan akan penguatan infrastruktur komunikasi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Basarnas adalah dengan meningkatkan infrastruktur komunikasi melalui penggunaan sistem komunikasi berbasis satelit. Sistem ini dirancang agar dapat bertahan meskipun terjadi gangguan komunikasi di lapangan, sehingga memastikan bahwa komunikasi antar tim di pusat kendali dan tim di lapangan tetap berjalan lancar.

Keterbatasan sumber daya, baik personel maupun perlengkapan, seringkali menjadi kendala dalam meningkatkan waktu tanggap dalam operasi SAR. Ketika bencana terjadi, sering kali jumlah personel yang tersedia tidak cukup untuk menangani besarnya skala bencana. Selain itu, distribusi peralatan dan logistik yang tidak merata di berbagai lokasi juga dapat menghambat kelancaran operasi. Untuk mengatasi masalah ini, Basarnas memanfaatkan sistem pemantauan real-time untuk mengawasi dan mengelola distribusi sumber daya, baik personel maupun perlengkapan, secara lebih efisien. Sistem ini memungkinkan Basarnas untuk memonitor ketersediaan alat transportasi, peralatan SAR, serta tenaga medis dan relawan yang dapat digerakkan dengan cepat sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Keterbatasan keterampilan dan pemahaman tugas yang tidak seragam antar bagian juga dapat memperlambat waktu tanggap operasi SAR. Sebagai upaya untuk mengatasi kendala ini, Basarnas secara rutin mengadakan pelatihan dan simulasi untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan para anggotanya. Latihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota tim, baik dari Basarnas maupun instansi lain yang terlibat, memahami dengan baik peran dan tanggung jawab

mereka dalam situasi darurat. Dalam latihan ini, berbagai skenario bencana dilakukan untuk menguji kemampuan para petugas dalam menghadapi berbagai situasi yang kompleks dan dinamis.

Upaya yang dilakukan oleh Basarnas untuk meningkatkan waktu tanggap operasi Pencarian dan Pertolongan tidak berhenti pada langkah-langkah yang telah disebutkan. Setiap operasi Pencarian dan Pertolongan yang dilakukan selalu dievaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam koordinasi. Evaluasi ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan dalam operasi berikutnya. Basarnas juga terus mengembangkan dan memperbaharui prosedur serta teknologi yang digunakan dalam koordinasi untuk menjawab tantangan yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya skala dan kompleksitas bencana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya:

1. Koordinasi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dalam meningkatkan waktu tanggap saat bencana masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan koordinasi antar instansi di Basarnas melibatkan penyusunan SOP bersama, penggunaan sistem komunikasi canggih, dan pemantauan real-time. Langkah ini memastikan peran setiap tim jelas dan koordinasi berjalan lancar, mempercepat waktu tanggap saat bencana dan meningkatkan efisiensi operasi Pencarian dan Pertolongan di lapangan.
2. Kendala yang ditemukan dalam koordinasi antar instansi pada saat bencana yaitu: Kendala utama yang ditemukan dalam koordinasi adalah perbedaan prosedur antar instansi, masalah komunikasi akibat gangguan akses, dan keterbatasan sumber daya. Kendala ini sering memperlambat respons awal dan mempengaruhi efisiensi distribusi bantuan serta pengorganisasian tim SAR di lapangan, yang berdampak pada waktu tanggap.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam koordinasi antar instansi untuk meningkatkan waktu tanggap saat bencana yaitu penguatan infrastruktur komunikasi, dan peningkatan keterampilan melalui latihan gabungan. Selain itu, pemantauan real-time dan peningkatan jumlah personel juga memastikan distribusi sumber daya tepat sasaran dan respons lebih cepat saat bencana terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Handoko, T. H. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Handoko, T. H. (2023). *Manajemen*. Yogyakarta: Kencana .
- Hasibuan, M. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mintzberg, H. (2023). *Understanding Organizations...Finally!: Structure in Sevens*. Oakland, CA: Berret-Koehler.
- Ndraha, T. (2021). *Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2020). *Management* (15th ed.). Boston: Pearson Education.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto, S. (2021). *Manajemen Koordinasi*. Jakarta: Grasindo
- Terry, G. (1980). *Principles of Management*. 8th ed. Homewood : Richard D. Irwin.
- Ulmer, R. R., Sellnow, T. L., & Seeger, M. W. (2016). *Effective Crisis Communication: Moving from Crisis to Opportunity*. Thousand Oaks: Sage Publications.

White, L. D. (1955). *Introduction to the Study of Public Administration*. New York: Macmillan.

Jurnal:

"Challenges to Coordination: Understanding Intergovernmental Friction in Disaster Response" by Daniel P. Aldrich. (2019), volume 10, issue 3, pages 306–316. *International Journal of Disaster Risk Reduction* diterbitkan oleh Elsevier

"Collaborative Decision-Making in Emergency and Disaster Management" by Naim Kapucu and Vener Garayev. *Disaster Prevention and Management Journal* by Emerald Publishing (2021)

"Efektivitas Koordinasi Antar Stakeholders Penanggulangan Bencana Oleh BPBD Kota Padang" oleh Nesy Yulia Murni dan Zikri Alhadi (2019). *Jurnal Pembangunan Nagari*, Volume 4 Nomor 1, Edisi Juni 2019

"Health Emergency and Disaster Risk Management: Review of the Sendai Framework Implementation" by Emily Ying Yang Chan, Zhe Huang, and Kevin Kei Ching Hung. *International Journal of Health Policy and Management* (2020)

"Inter-agency Collaboration and Disaster Management: A Case Study of the 2005 Earthquake in Pakistan" by Shah Jambá: *Journal of Disaster Risk Studies*, diterbitkan oleh AOSIS OpenJournals

"Koordinasi dalam Penanganan Darurat Bencana" oleh Muzdalifah (2023). *Journal of Current Research in Disaster Response and Emergency Management*, Volume 1 Nomor 1, 2023

"Barriers to and Facilitators of Inter-Organizational Coordination in Response to Disasters: A Grounded Theory Approach" By F. Dami, V. Fuchs, E. Péclard, et al (2020)